

**ANALISIS ISI PEMBERITAAN MEDIA KEDULATAN RAKYAT DAN
KOMPAS MENGENAI OMNIBUS LAW**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia

Oleh:

Muhammad Thedo Hartanto

15321076

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS PSIKOLOGI DAN
ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

Lembar Persetujuan
Analisis isi pemberitaan media Kedaulatan Rakyat dan Kompas mengenai
Omnibus Law

Disusun Oleh:
MUHAMMAD THEDO HARTANTO
15321076

Telah di setuju dosen pembimbing skripsi untuk di ujikan dan di pertahankan
di hadapan tim penguji skripsi

Tanggal : 25 Februari 2022
Dosen Pembimbing Skripsi,



Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A

NIDN : 0512048302



Lembar Pengesahan
SKRIPSI

(Analisis isi pemberitaan media Kedaulatan Rakyat dan Kompas mengenai
Omnibus Law)

Disusun oleh:

Muhammad Thedo Hartanto

15321076

Telah dipertahankan dan disahkan oleh dewan penguji skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 25 Februari 2022

Dewan penguji

1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I. Kom., M.A
NIDN: 0512048302
2. Anggota : Ida Nuraini Kodrat Ningsih, S.I.Kom., M.A.
NIDN: 0523098701



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN 0529098201

Pernyataan etika akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Muhammad thedo Hartanto

No mahasiswa : 15321076

Melalui surat pernyataan ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Univesitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 25 februari 2022

Yang menyatakan



Muhammad Thedo hartanto

MOTTO

“ sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu “

Persembahan

Karya ini saya persembahkan kepada papa dan mama

Papa Edi dan mama Tatik, keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya bagi kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Atas pertolongan dari Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Analaisi isi pemberitaan pada media kedaulatan rakyat dan Kompas tentang omnibus law”** yang telah disusun dengan baik sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti telah melawati beberapa hambatan. Namun berkat adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak maupun teman teman yang ada, peneliti akhirnya mampu untuk terus berjuang dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, peneliti tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Terima kasih kepada bapak Holy Rafika Dhona S.I.Kom.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkontribusi hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai. Terima kasih kepada bapak yang sudah sangat baik dan sabar untuk selalu meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, memberikan kritik serta nasehat untuk saya dalam menghadapi permasalahan yang ada saat proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin
2. Terima kasih kepada Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
3. Terima kasih kepada mba Ida Nuraini Kodrat Ningsih,S.I.Kom.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing selama peneliti menjalani proses perkuliahan. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
4. Terima kasih kepada bg theo dan theto selaku abang dan adik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama menempuh Pendidikan di jogja ini.

5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak sedarah tapi layak menjadi saudara yang ada di jogja atau di batam atas semangat dan motivasi selama ini , kalian luar biasa .
6. Terima kasih kepada sahabat, teman – teman Ilmu Komunikasi senior dan juga junior yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, terimakasih atas pengalaman dan juga kebersamaan selama peneliti berproses di kampus tercinta Universitas Islam Indonesia.

Penulis sadar bahwa proses penyelesaian tugas akhir ini tidak luput dari adanya kesalahan dan masih belum sempurna. Penulis memiliki harapan bagi para pembaca untuk bisa memberikan masukan dan kritik serta bisa menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi untuk dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, februari 2022

Muhammad Thedo Hartanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Akademik.....	1
MOTTO.....	2
Persembahan.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
ABSTRAK.....	7
<i>ABSTRACT</i>	8
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Landasan Teori	19
G. Metode Penelitian	24
BAB II.....	36
PROFIL KORAN KEDAULATAN RAKYAT DAN KOMPAS.....	36
A. Profil Kedaulatan Rakyat.....	36
B. Profil Kompas.....	39
BAB III.....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Temuan Data	45
B. Pembahasan	51
BAB IV.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN.....	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

Analisis Isi Pemberitaan Media Kedaulatan Rakyat dan Kompas mengenai Omnibus Law

ABSTRAK

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus law* dan mendeskripsikan bagaimana pemerintah dicitrakan dalam pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus Law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang dipakai peneliti pada penelitian ini adalah metode analisis isi. Subjek penelitian ini adalah pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* tentang Omnibus Law pada bulan September – Oktober 2020. Berita Omnibus Law Kompas diperoleh dari mengumpulkan berita dari situs kompas.id yang dilanggan oleh Prodi Komunikasi UII. Dengan menggunakan keyword Omnibus Law. Sementara itu berita Omnibus Law di *Kedaulatan rakyat* dikumpulkan dengan cara mengunduh dari website *Kedaulatan Rakyat* www.kr.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakyat* adalah tentang penolakan terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah menteri. Pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan netral. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif. Topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kompas* adalah tentang Dampak terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah Polri dan unsur pemerintah lainnya. Pada pemberitaan *Kompas*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan negatif. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif. Pada pemberitaan tentang Omnibus Law di *Kedaulatan Rakyat*, pemerintah lebih banyak dicitrakan netral, sedangkan pada *Kompas*, pemerintah lebih banyak dicitrakan netral.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Analisis Isi, Pemberitaan*

Content Analysis Of Media Coverage Of People's Sovereignty and Kompas Regarding Omnibus Law

ABSTRACT

Omnibus law is a law whose substance is to revise and/or revoke many laws. This study aims to describe the content of the media coverage of the People's Sovereignty and Kompas regarding Omnibus law and describe how the government is imaged in the media coverage of the People's Sovereignty and Kompas regarding Omnibus Law. This study used qualitative research methods. The research method used by researchers in this study is content analysis method. The subject of this research is the media coverage of the People's Sovereignty and Kompas about Omnibus Law in September – October 2020. The news of the Kompas Omnibus Law was obtained from collecting news from the kompas.id site subscribed to the UII Communication Study Program. By using the keyword Omnibus Law. Meanwhile, news on Omnibus Law on People's Sovereignty is collected by downloading it from the People's Sovereignty website www.kr.co.id. The results showed that the most widely reported topic by the People's Sovereignty was the rejection of the Omnibus Law. The sources outside the government most cited by were from NGOs. The most cited government sources are ministers. In reporting on People's Sovereignty, the Omnibus Law is mostly portrayed as neutral. The form of the data presented is qualitative. The topic that is most frequently reported by Kompas is the Impact on the Omnibus Law. The sources outside the government most cited by were from NGOs. The most cited government sources are the Police and other government elements. In Kompas news coverage, the Omnibus Law has the most negative imagery. The form of the data presented is qualitative. In reporting on the Omnibus Law in the People's Sovereignty, the government is more neutral, while in Kompas, the government is more neutral.

Keywords: Omnibus Law, Content Analysis, News

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak aturan yang menurut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghambat perekonomian dan investasi. Izin lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah persyaratan yang menyulitkan investor. Akibatnya, beberapa aturan harus dilonggarkan, dan kewajiban perizinan investasi Amdal dan IMB harus dihilangkan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak aturan dan hukum. Bahkan pada tahun 2017 jumlah regulasi mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu).

Dari sisi ekonomi dan investasi, pemerintah telah mengidentifikasi 74 (tujuh puluh empat) peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan investasi. Pemerintah akan menyiapkan dua (dua) undang-undang penting dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, yaitu RUU tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. (Ramadhan, 2019). Persoalannya adalah apakah banyaknya undang-undang menjadi masalah atau apakah faktor lain, seperti peraturan yang tidak harmonis, merupakan masalah sebenarnya. Jika regulasi menimbulkan banyak masalah, maka pendekatan omnibus law untuk menyederhanakannya adalah jalan yang harus ditempuh.

Sebab, omnibus law yang sifatnya merevisi dan mencabut sejumlah undang-undang sekaligus, menitikberatkan pada penyederhanaan sejumlah aturan. Jika masalah regulasi bukan hanya dari segi kuantitas, seperti regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral dalam pembentukan regulasi yang tidak terkendali, atau masalah

proses pembentukan yang tidak partisipatif yang mengakibatkan regulasi tersebut ditolak oleh pemerintah. masyarakat, pasti masalahnya akan berbeda (Busroh, 2017).

Omnibus law adalah undang-undang yang bertujuan untuk merevisi dan/atau mencabut sejumlah undang-undang. Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada adalah contoh negara-negara common law yang memiliki sistem hukum anglosaxon. Pengertian omnibus law menawarkan solusi atas permasalahan yang dihasilkan oleh regulasi yang berlebihan (overregulation) dan aturan yang tumpang tindih (overlapping). Jika masalah diselesaikan dengan cara tradisional, itu akan memakan waktu lama dan menghabiskan banyak uang. Belum lagi proses penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan sering kali menemui jalan buntu atau bertentangan dengan kepentingan pemangku kepentingan (Busroh, 2017).

Serbia adalah salah satu negara pertama yang menggunakan konsep omnibus law untuk mengontrol posisi independen Provinsi Vojvodina pada tahun 2002. Undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan gagasan ini mencakup yurisdiksi provinsi Vojvodina di bidang budaya, pendidikan, bahasa, jurnalisme, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga (Busroh, 2017).

Seperti yang dialami Indonesia saat ini, konsep omnibus law sebenarnya bisa menjadi solusi penyederhanaan regulasi yang terlalu banyak. Menurut Bappenas, pemerintah pusat mengeluarkan 12.471 peraturan antara tahun 2000 dan 2015, dengan departemen sebagai produsen teratas dengan 8.311 peraturan.

Peraturan pemerintah adalah jenis peraturan yang paling umum berikutnya, dengan total 2.446. Sementara itu, Perda kabupaten/kota yang berjumlah 25.575 perda merupakan produk regulasi yang paling banyak dihasilkan oleh pemerintah daerah, disusul dengan perda provinsi yang berjumlah 3.177 perda (Bappenas, 2019).

Menurut data dari Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang diterbitkan antara 2014 dan Oktober 2018.⁶ Data ini tidak termasuk peraturan yang diundangkan dalam setahun terakhir, dari Nopember 2018 hingga sekarang

Selain terlalu banyak, peraturan ini juga tumpang tindih, sehingga tidak cukup hanya mengubah satu undang-undang untuk menangani satu masalah. Misalnya, jika ada masalah regulasi di bidang kehutanan yang perlu diluruskan, maka berlaku UU Kehutanan No. 41/1999. Namun, peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, tetap menjadi kendala (Hukumonline.com). Selain kelebihan regulasi, ada tiga isu mendasar lainnya. Yang pertama adalah pemisahan perencanaan legislatif dan peraturan di tingkat nasional dan daerah dari perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, peraturan perundang-undangan seringkali berbeda dengan subyek yang harus diatur. Ketiga, ketidakpatuhan dengan materi konten meningkatkan momok "hiper-regulasi." Keempat, kemandirian undang-undang dan peraturan sering menjadi titik perdebatan di seluruh implementasi. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme untuk memantau dan menganalisis undang-undang dan peraturan, serta tidak adanya lembaga khusus yang bertugas mengawasi semua aspek sistem legislatif (Hukumonline.com).

Aksi unjuk rasa RUU Cipta Kerja (atau lebih sering disebut protes terhadap omnibus law) adalah rangkaian acara yang digelar sejak Januari 2020 untuk menentang pemberlakuan RUU Cipta Lapangan Kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan DPR. Perwakilan. Pemerintah mengatakan bahwa melalui penyederhanaan persyaratan peraturan untuk izin

perusahaan dan proses pembebasan lahan, undang-undang penyapuan universal bermaksud untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi asing dan domestik. Di sisi lain, pengunjung rasa berpendapat bahwa materi undang-undang sweeping universal masih dalam tahap awal, yang merugikan sejumlah pihak. Mereka juga mempertanyakan perlunya mempertimbangkan undang-undang ini menyusul penarikan langkah-langkah yang lebih signifikan dari pembahasan DPR, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Kompas.Com diakses 11 November 2020).

Terlepas dari protes dan kecaman keras, RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Beberapa jam sebelum RUU itu disahkan, 35 perusahaan investasi mengirimkan surat kepada pemerintah untuk memperingatkan dampak negatif rencana tersebut terhadap lingkungan (Sebastian, 2020).

Dua media massa yang dipilih pada penelitian ini adalah Kedaulatan Rakyat dan Kompas. Kedaulatan Rakyat dipilih karena dianggap sebagai media yang dapat mewakili media massa atau koran lokal, sedangkan Kompas dianggap dapat meneliti media massa atau koran nasional. Alasan mengambil media local dan nasional adalah karena penelitian ini mengetahui bagaimana media lokal nasional mencitrakan pemerintah dalam berita *Omnibus Law*.

Selain itu berita local khususnya Kedaulatan Rakyat dalam sebuah jurnal yang peneliti dapatkan bahwa KR (kedaulatan rakyat) merupakan media isu yang di angkat sangat akurat hal ini bisa di lihat dari Judul berita yang dituliskan yang bersifat obyektif Judul berita tidak mengundang amarah ataupun menyindir, berita yang dituliskan pada Kedaulatan Rakyat mengundang rasa penasaran pembaca untuk membaca lebih lanjut berita tersebut selain itu berita tidak bertele-tele, berita yang dituliskan jelas dan cukup memberikan pandangan tentang berita. Obyektif dengan kalimat yang mudah dipahami. Kutipan bersumber hal ini bisa dilihat

bahwa sumber dalam berita dituliskan secara tersurat, sehingga dapat dipastikan bahwa kebanyakan sumber berita dapat berasal dari wawancara dari narasumber yang terkait dalam berita. Hal ini dapat di percaya. (Arya Tangkas dkk 2022)

Dalam jurnal lain dijelaskan bahwa berita nasional khususnya Kompas merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Diupdate secara terus menerus selama 24 jam sehari, dengan total readership lebih dari 10 juta orang. Sedangkan tingkat kunjungan atau lebih dikenal dengan sebutan page view, mencapai 40 juta setiap bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page view perbulan⁸. Pada tahun 2012 Kompas.com memperoleh penghargaan diantaranya sebagai portal berita terfavorit dari Gadget+, sebagai portal berita terpopuler dari majalah *Markeeters* dan *Markplus Insight* serta dari *Granat Awards* sebagai media yang pemberitaannya konsisten memerangi Narkoba. Dalam pemberitaan menteri Susi, Kompas.com memberi ruang khusus yang membahas tentang Susi Pudjiastuti Liputan khusus ini berisi topik khusus perjalanan menteri Susi selama menjabat sebagai menteri. (Tari Suprobo, 2016).

Dengan ini menjadi landasan utama peneliti memilih media lokal dan media nasional khususnya kedaulatan rakyat dan Kompas. Berdasarkan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Isi Pemberitaan Media Kedaulatan Rakyat dan Kompas Mengenai Omnibus Law Periode September - Oktober 2020. Istilah "analisis isi berita" sering digunakan untuk menggambarkan proses analisis isi media baik cetak maupun elektronik. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk menyelidiki dan menarik kesimpulan tentang suatu fenomena dengan menggunakan dokumen dari media cetak dan elektronik. Peneliti dapat menyelidiki deskripsi konten, fitur pesan, dan evolusi konten menggunakan analisis konten. Lebih jauh lagi, berita dapat mengungkapkan siapa yang diuntungkan atau dirugikan, serta pihak mana yang menindas atau tertindas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus Law*?
2. Bagaimana perbandingan pemberitaan *Omnibus Law* di kedua media tersebut?
3. Bagaimana pemerintah dicitrakan dalam pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus Law*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan isi pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus law*.
2. Mendeskripsikan bagaimana pemerintah dicitrakan dalam pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* mengenai *Omnibus Law*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan sumbangan pemikiran tertulis kepada jurusan Ilmu Komunikasi.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam memahami analisis isi terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi untuk masa yang akan datang, serta makna dari pemberitaan yang disampaikan oleh media massa tentang isu tertentu.

E. Penelitian Terdahulu

Ika Novitas dkk. (2021) melakukan kajian tentang Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Berita tentang Penciptaan Lapangan Kerja Omnibus Law di Media Online Vivanews dan Tirto.id). Pengesahan UU Cipta Kerja pada awal Oktober mengangkat isu ini menjadi topik hangat dan memicu diskusi luas di berbagai media tentang argumen publik yang mendukung dan menentang pengesahan UU Cipta Kerja, yang dianggap menguntungkan kelas menengah ke bawah. Media sangat penting dalam membingkai berita, menentukan bagaimana publik memandang sebuah berita berdasarkan bagaimana media membingkai berita dan perspektif tentang peristiwa yang ingin disorot oleh media. Hal ini terlihat pada media yang membingkai berita dari berbagai perspektif, yang kemudian dapat mempengaruhi opini publik. Undang-Undang Hak Cipta Ketenagakerjaan (Omnibus Law) di media online Vivanews dan Tirto.id menarik sebagai bahan penelitian karena menunjukkan bagaimana seharusnya media beroperasi dan bagaimana media lain meresponsnya. Penulis karya ini menggunakan analisis framing sesuai dengan Robert N. Entman. Perbedaan framing antara kedua portal berita tersebut terlihat dari pemilihan sumber, penggunaan bahasa dalam judul berita, pemilihan gambar, dan rekomendasi atau saran dalam pemberitaan tentang UU Cipta Kerja. Baik Tirto.id dan Vivanew memiliki kecenderungan sendiri dalam menyusun berita mereka tentang hal ini.

Adiitya Yoga Pratama dkk (2021) menerbitkan makalah berjudul Analisis Sentimen Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Seleksi Fitur Chi-Square (Kasus Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja). Penggunaan teknologi informasi meningkat dengan pesat, didorong oleh opini publik yang dapat diungkapkan secara bebas melalui media sosial. Twitter adalah salah satu platform media sosial. Karena tweet pengguna dibatasi hingga 140 karakter dan tagar "#" dapat dengan cepat dicari untuk skenario terkait yang sedang dibahas, Twitter diyakini sebagai cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan informasi tentang pemikiran dan sentimen yang ada. Perdebatan yang cukup panjang mengenai pengesahan undang-undang hak cipta omnibus beberapa waktu lalu. Tagar "#omnibuslaw" dan tagar terkait lainnya dibanjiri dengan tweet yang mengungkapkan sentimen yang penuh gairah. Penelitian ini memberikan evaluasi tweet terkait omnibus law menggunakan fungsi seleksi Chi Square R Studio dan algoritma K-Nearest Neighbor. Kumpulan data termasuk 500 tweet tentang RUU omnibus. Penemuan Pengetahuan dalam Database adalah metodologi yang digunakan. Para ahli yang dipisahkan menjadi perasaan baik dan negatif melabeli data tersebut. Menurut temuan pemodelan menggunakan K-Fold Cross Validation, akurasi maksimum diperoleh ketika skema fitur 25% (pemilihan fitur Chi Square) digunakan, dan $k = 5$ diatur ke 81,4 persen di KNN. Pengujian pada model dilakukan dengan menggunakan 100 sampel acak dan menghasilkan akurasi 83 persen, presisi 100 persen, recall 15%, dan nilai F-Measure 26,08 persen. Istilah "orang" adalah istilah yang paling sering digunakan dalam 500 titik data yang dikumpulkan. Sentimen negatif menyumbang 78,8 persen dari 500 titik data yang dikumpulkan, sedangkan sentimen positif menyumbang 21,2 persen.

Bondan Kurniasih (2021) melakukan penelitian dengan judul *Pembingkayaan ruu omnibus law cipta kerja dalam media Online (Analisis Framing Pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta*

Kerja pada Kompas.com dan Katadata.co.id Periode Maret-Mei 2020). Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam framing berita RUU Cipta Kerja Omnibus Law di media arus utama Katadata.co.id dan Kompas.com. Katadata.co.id cenderung membuat pernyataan yang menunjukkan bias kepada masyarakat terhadap Omnibus Law yang bisa ditimbulkan dari multiple tren negatif dari pemikiran pemerintah. Dan Kompas.com cenderung memberikan opini positif dari pemerintah dan parlemen. Dilihat dari yang lebih besar pemilihan ide dan pernyataan pembicara dalam teks.

Mochamad Nuryadi (2013) melakukan penelitian mengenai analisis isi informasi lingkungan hidup di beberapa surat kabar, antara lain Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan. Penelitian tersebut tujuannya hendak mengkaji karakteristik surat kabar dalam menampilkan informasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga surat kabar tadi berupaya menyajikan berita lingkungan hidup secara berimbang, akurat, jelas dan objektif.

Syamsiah Amali (2017) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Isi Program Kominfo Pada Surat Kabar Daerah*. Media massa memiliki peran yang sangat penting. Media massa dalam penelitian ini di batasi hanya pada media cetak yaitu Surat Kabar. Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pedoman untuk arah pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, dimana menjadi bagian pemerintahan sehingga mendukung kepada Fokus program pembangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan program Kominfo yang disajikan oleh empat surat kabar daerah. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan data surat kabar yaitu setiap hari kerja, unit analisis adalah pemberitaan yang berkaitan dengan program Kominfo, Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan first level

agenda setting. Dan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan pemberitaan program Kominfo yang disajikan empat surat kabar daerah yang paling dominan yaitu surat kabar harian Maluku Utara Post.

Almunaware dkk. (2015) menerbitkan penelitian berjudul Analisis Isi Berita Kontroversial Basuki Tjahaja Purnama Dalam Rangka Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta di Surat Kabar Tribun Manado. Kontroversi seputar pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di surat kabar Tribun Manado menjadi latar belakang penelitian ini. Studi ini menjelaskan isi berita kontroversial dan cara penyampaiannya. Teori Analisis Isi Holsti dan Teori Agenda Setting digunakan sebagai teori pendukung. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan satu variabel yang diteliti yaitu Isi Berita Kontroversial. Melalui penerapan teknik analisis data statistik deskriptif. Menurut penelitian yang dilakukan, liputan berita kontroversi September hingga November 2014 tidak selalu memuat liputan kontroversi. Setidaknya, hal itu terlihat dari model penjadwalan rapat redaksi berita Tribun Manado.

Widhi Nugroho (2021) melakukan penelitian berjudul “Analisis Framing Berita Polemik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja Indonesia” di Kompas.com dan Okezone.com pada masa pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Sejumlah media, termasuk Kompas.com dan Okezone.com, membingkai pemberitaan tentang polemik omnibus law hak cipta karya dari berbagai perspektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Kompas.com dan Okezone.com membingkai berita tentang perdebatan omnibus law Indonesia atas hak cipta karya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi realitas sosial. Model untuk menganalisis isi teks adalah Robert N. Entman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com dan Okezone.com

masing-masing memiliki perspektif berbeda dalam membingkai sebuah berita. Sementara kedua media memaknai peristiwa polemik omnibus hak cipta karya sebagai akibat penolakan pekerja terhadap isi RUU dan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, terdapat perbedaan dalam penonjolan/pemilihan isu. Dalam membingkai pemberitaan, kedua media ini menggunakan narasumber yang cenderung meragukan dan mengkritisi isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa kedua media tersebut tetap menjunjung tinggi akurasi dan objektivitas, serta tidak terlihat adanya kecenderungan untuk meminggirkan pihak-pihak tertentu.

F. Landasan Teori

1. Surat Kabar Membentuk Opini Publik

Orang memiliki pengertian realitas yang terbatas dan sempit, menurut Noelle-Neumann, karena media tidak menyajikan penilaian peristiwa yang luas dan seimbang. Ubiquity, kumulatif, dan konsonan merupakan tiga ciri atau ciri media massa yang berperan dalam membentuk opini publik.

Konsep ubiquity mengacu pada asumsi bahwa media merupakan sumber pengetahuan yang sangat luas karena tersedia di mana-mana; dengan kata lain, ubiquity adalah keyakinan bahwa media tersedia di mana-mana. Karena media ada di mana-mana, ia menjadi alat vital yang dapat diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha untuk mendapatkan dukungan publik atas pandangan atau opini yang disampaikannya selama pandangan atau opini tersebut disampaikan, dan selama pandangan atau opini tersebut disampaikan, maka pandangan atau opini tersebut ada dimana-mana. Sifat konsonan (konsonan) berkaitan dengan pandangan, sikap, dan nilai bersama media massa.

Konsonan terbentuk, menurut Noelle-Neutmann, sebagai akibat dari keinginan media untuk mendukung atau menegaskan kembali keyakinan dan pendapat mereka sendiri sambil membuatnya tampak seolah-olah berasal dari masyarakat. Keberadaan dan konsonan media memiliki dampak yang signifikan terhadap opini populer. Karena media memiliki potensi untuk mengidentifikasi dan mendistribusikan opini yang lebih dapat diterima oleh masyarakat umum, hal itu berkontribusi pada terciptanya spiral keheningan. Dengan kata lain, mereka yang memiliki sudut pandang berbeda dengan audiens akan lebih sulit mendapatkan posisi di media. Representasi jurnalis terhadap media, di sisi lain, terkadang berbeda atau bahkan bertentangan dengan opini publik. Dalam beberapa keadaan, sudut pandang media bertentangan dengan individu dalam masyarakat. Jika ini masalahnya, akan ada dua sudut pandang yang berbeda. Akan ada dua versi realitas yang bekerja di sini: realitas versi media dan realitas versi publik. 530-531) (Morissan, 2013).

Opini publik menurut Redi dalam Sutarso (2012) adalah kumpulan gambar yang dibentuk atau diciptakan melalui suatu proses komunikasi. Karena perbedaan persepsi di antara peserta komunikasi, citra realitas sejati selalu berwajah banyak atau memiliki banyak dimensi. Saat salah satu peserta percakapan berubah, gambar akan menyesuaikan dengan mereka. Siapa yang berpartisipasi dalam proses komunikasi menentukan arah pergeseran citra. Pembentukan opini publik dimulai dari sebuah kebenaran faktual, yang kemudian menjadi wacana melalui proses komunikasi. Adanya upaya komunikasi yang bertujuan mempengaruhi atau membujuk orang atau pihak lain membentuk opini publik (Sutarso, 2012: 3-4).

2. Teori Agenda Setting

Sekitar tahun 1968, McComb Donald L. Shaw menemukan ide agenda setting. Media, menurut pandangan ini, berpotensi mentransfer masalah untuk mempengaruhi agenda publik. Karena media menganggap suatu isu penting, maka khalayak akan menganggapnya penting juga (Griffin, 2003: 490). Kurt Lang melakukan eksperimen serupa pada tahun 1983, dengan kesimpulan bahwa liputan media merupakan variabel penentu yang mempengaruhi apa yang dianggap signifikan untuk dibahas oleh publik.

Rogers dan Dearing dilaporkan oleh Stephen W. Littlejohn dan Karen Foss (2005:280) yang menyatakan bahwa fungsi penetapan agenda adalah prosedur linier tiga bagian. Pertama-tama, awak media harus menyiapkan Agenda Media. Kedua, Agenda Media mempengaruhi atau berinteraksi dalam beberapa cara dengan agenda publik atau naluri publik tentang pentingnya masalah, yang pada gilirannya mempengaruhi agenda kebijakan. Ketiga, Agenda Kebijakan (policy) adalah apa yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan publik dan swasta, atau apa yang dianggap signifikan oleh publik.

Brosius (Eriyanto,2018:200) membuat sebuah tinjauan mengenai asumsi teori agenda setting yang mengalami perubahan di era internet. Asumsi pertama, media memilih isu tertentu untuk dihadirkan kepada khalayak. Asumsi ini secara teoritis mengalami perubahan di era internet, dimana lingkungan media lebih banyak menghadirkan agenda dibandingkan sebelumnya. Berbagai macam media baik media offline tradisional, online tradisional dan media sosial bersaing menghadirkan agenda atau dapat mendukung agenda tertentu, menyebarkan dan mendukung isu. Asumsi kedua, publik akan mencari petunjuk atas peristiwa dan kejadian penting melalui media. Asumsi ketiga, hubungan langsung antara topik yang dipandang penting oleh media (agenda media) dengan topik yang dinilai penting oleh publik (agenda publik). Pilihan media yang beragam, khalayak mempunyai peluang

untuk mengakses banyak media. Yang terjadi bukan lagi hubungan yang searah, tetapi pencampuran, dimana publik menggabungkan agenda dari banyak sumber. Asumsi mengenai hubungan kausal ini lebih kompleks di era internet. Asumsi keempat, peranan gatekeeper dalam menyeleksi topik yang dipandang penting. Dalam media baru, pengguna media dapat melewati proses ini dan menentukan sendiri apa yang mereka anggap perlu dan penting. Posisi teori agenda setting di era internet, tidak terjadi kesepakatan di kalangan ahli komunikasi.

Secara umum, ada tiga skenario (Eriyanto,2018:201-209).

a. Skenario I (pertama)

Chaffee dan Metzger (Eriyanto,2018:201) berargumen mengenai kurang relevannya teori agenda setting di era internet. Ada dua alasan yang dikemukakan mereka. Alasan pertama, teori agenda setting didasarkan pada asumsi orang mendapatkan berita dari sumber terbatas. Meskipun jumlah media banyak, tetapi media yang dominan dan dikonsumsi publik jumlahnya sedikit. Alasan kedua, teori agenda setting mengasumsikan individu terlibat dalam wacana publik dengan cara memperhatikan isu-isu yang sedang dibicarakan oleh publik luas. Asumsi ini tidak relevan pada masa internet yang ditandai oleh khalayak yang terfragmentasi, khalayak semakin spesifik dan lebih tertarik dengan isu-isu yang spesifik pula. Alasan ketiga, teori agenda setting dikaitkan dengan proses gatekeeping, di media tradisional seperti surat kabar dimana para profesional/pekerja media menyeleksi peristiwa yang dianggap penting. Proses gatekeeping ini media seolah „memilih“ isu yang seharusnya diperhatikan oleh publik. Di era internet asumsi proses gatekeeping bisa berubah, khalayak saat ini bersifat aktif dalam memilih isu yang dipandang penting. Perubahan ini didukung oleh jumlah dan keragaman isi media yang

bisa memenuhi kebutuhan khalayak. Pada era internet, publik bisa memilih isu apa yang seharusnya diliput oleh media. Kelahiran media baru bisa mengubah agenda publik. Kelahiran media baru mengubah peran pembentukan agenda publik yang sebelumnya dilakukan oleh media lama.

b. Skenario II (kedua)

Pada skenario kedua, teori agenda setting tetap relevan dengan kehadiran internet dan media sosial. Perbedaan teori agenda setting pada era sebelumnya (tahun 1970-an) yaitu sumber informasi publik dalam menentukan agenda publik. Pada tahun 1970-an pertama muncul teori agenda setting, media relatif terbatas. Agenda publik ditentukan oleh sejumlah media terutama televisi. Di era internet, terjadi perubahan besar dimana jumlah media sangat banyak dan publik mempunyai beragam alternatif sumber informasi. Adanya sumber informasi yang makin beragam tidak membuat teori agenda setting tidak bekerja. Hanya saja teori agenda setting ini harus direvisi dengan memasukkan media baru sebagai salah satu sumber informasi publik. Berbeda pada skenario pertama, skenario kedua masih menempatkan media tradisional (televisi/radio/surat kabar) sebagai sumber informasi, selain media baru. Althaus dan Tewksbury (Eriyanto,2018:207) seorang ahli yang dikategorikan skenario kedua ini membuat studi mengenai bagaimana agenda seseorang (isu yang dianggap penting) sangat ditentukan oleh media yang dikonsumsi. Perbedaan terjadi pada format media. Pada media cetak, formatnya bersifat hierarkis. Isu yang dianggap penting oleh redaksi media akan ditempatkan di halaman utama. Sementara pada media online, susunan berita umum dibuat dalam format kronologis. Berita yang baru diunggah akan diletakan di bagian atas, dan posisi ini akan digantikan oleh berita yang lebih baru lagi dan begitu seterusnya. Selain itu, pembaca media online

lebih aktif dalam memilih berita, tidak tergantung kepada berita yang disediakan oleh redaksi media seperti pada pembaca media cetak.

c. Skenario III (ketiga)

Skenario tiga sama dengan skenario kedua, skenario ketiga tidak menolak keberadaan teori agenda setting pada masa internet. Teori ini masih relevan, hanya saja harus dikembangkan agar bisa menjelaskan fenomena komunikasi media yang semakin kompleks. Selain sumber informasi yang semakin banyak dan beragam, juga karena kekuatan media dalam membentuk agenda mengalami perubahan. Hubungan antara agenda media dan publik jika sebelumnya digambarkan searah, pada masa internet digambarkan timbal balik. Media tradisional mengakui keberadaan internet dan media sosial yang semakin punya posisi penting. Salah satu pengembangan dari teori ini adalah intermedia agenda setting dan reversed agenda setting. Di era media baru, tidak bisa lagi dipisahkan antara media tradisional dan media baru, keduanya saling mempengaruhi (intermedia). Selain itu, agenda yang muncul dipublik tidak bisa lagi dilihat akibat agenda yang ditentukan oleh media, karena agenda media juga bisa ditentukan oleh apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik (*reversed*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, dengan memperhatikan realitas dan kondisi kehidupan nyata. Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah bukannya menggeneralisasi

permasalahan. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan kuantifikasi lainnya. Pendapat lain oleh Lexy J. Moleong (dalam Prastowo, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode analisis isi (content analysis) digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Analisis isi (Eriyanto, 2018: 1) adalah metode sistematis untuk menganalisis isi dan bagaimana pesan disampaikan. Disebutkan bahwa analisis isi berguna karena dapat memprediksi siapa yang akan menerima pesan, menyampaikan pesan dan cara penyampaiannya.

2. Metode Analisis Isi

Analisis isi adalah metode untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi kualitas pesan secara tidak memihak dan metodis. (1989, Holsti dalam Fluornoy). Analisis isi memiliki metode analisis data tersendiri sebagai alat penelitian. Metode ini tidak sama dengan melihat atau mewawancarai individu secara pribadi; sebaliknya, peneliti memeriksa komunikasi atau data yang telah dihasilkan dan mengajukan pertanyaan tentangnya (Kerlinger, 1973).

Analisis isi, menurut Fluornoy (1989), adalah metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Metode ini sering digunakan untuk menentukan ciri isi surat kabar dari segi frekuensi, volume, dan pemanfaatan sumber informasi berdasarkan bidang masalah, serta

tren konten. Sedangkan analisis isi berguna untuk mendapatkan informasi dari isi komunikasi yang dikomunikasikan dalam bentuk simbol-simbol, menurut (Rachmat, 1991).

Menurut Berelson dalam Holsti (1969), pendekatan penelitian analisis isi dapat menggambarkan substansi komunikasi eksplisit secara objektif, sistematis, dan numerik. Objektivitas dicapai dengan menggunakan kategori analisis yang dikategorikan dengan benar, memastikan bahwa orang lain yang menganalisis konten yang sama akan mendapatkan hasil yang sama. Sistematis mengacu pada penggunaan proses yang sama untuk semua konten yang dipelajari. Sedangkan kuantitatif menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada perhitungan numerik atau data kuantitatif.

Perumusan kategori secara langsung terkait dengan variabel studi dan tujuan penelitian, menurut Berelson dalam Kerlinger (1973). Pengambilan sampel konten dan data penelitian yang salah akan berasal dari perumusan kategori yang salah. Namun, peneliti media lain mengklaim bahwa saat membuat kategori, tiga faktor harus dipertimbangkan: (1) kategori harus relevan dengan tujuan studi; (2) kategori harus fungsional; dan (3) sistem kategori harus dapat diatur (Stamp dalam Flournoy, 1989). Beberapa kategori elemen teknis media dipinjam dari penelitian Litbang Kompas tentang media yang dilakukan bekerjasama dengan Undip Media Center (2003), sedangkan tahapan proses kebijakan digunakan untuk kategori aspek kebijakan. Untuk menyelaraskan dengan kedua tujuan penelitian, perubahan tertentu dilakukan.

3. Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2016:177) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika

koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item terebut dinyatakan tidak valid

Untuk mencari nilai koefisien, maka peneliti menggunakan rumus pearson product moment sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum X_1 X_{1tot}) - (\sum X_1)(\sum X_{1tot})}{\sqrt{((n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n\sum x_{1tot}^2) - (\sum x_{1tot})^2))}}$$

Keterangan :

r = Korelasi product moment

$\sum X_i$ = Jumlah skor suatu item

$\sum X_{tot}$ = Jumlah total skor jawaban

$\sum x_i^2$ = Jumlah kuadrat skor jawaban suatu item

$\sum x_{tot}^2$ = Jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum X_i X_{tot}$ = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor

Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrument valid adalah nilai indeks valid adalah nilai indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2016 : 179). Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

4. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012) Uji realianilitas kuesioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelimpok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok

skor tiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi 0,7 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel.

Adapun rumus untuk mencari reliabelitas adalah sebagai berikut.

$$r = \frac{n(\Sigma AB) - (\Sigma A)(\Sigma B)}{\sqrt{((n\Sigma A^2) - (\Sigma A)^2)(n(\Sigma B^2) - (\Sigma B)^2)}}$$

Dimana :

- r = koefisien korelasi
- n = banyaknya responden
- A = skor item pertanyaan ganjil
- B = skor pertanyaan genap

Setelah koefisien korelasi diketahui, aka selanjutnya hasil tersebut dimasukan

kedalam rumus Spearman Brown dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{2rb}{1 + rb}$$

Dimana :

- r = nilai reliabilitas
- rb = korelasi produk moent antara belahan pertama (ganjil) dan belahan kedua (genap).

5. Unit Analisis Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemberitaan media *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* tentang Omnibus Law pada bulan September – Oktober 2020.

Berita Kedaulatan Rakyat yang dianalisis dalam berita ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Berita Kedaulatan Rakyat

Judul Berita	Terbit Tanggal
Omnibus Law Berdampak Positif Bagi Pasar Modal Indonesia	26 Oktober 2020
Buruh dan Elemen Pemuda Tolak Aksi Anarkistis Omnibus Law	19 Oktober 2020
Mahfud Tegaskan Pemerinah Tak Pernah Tuduh SBY Dalangi Demo	15 Oktober 2020
Draft Final UU Cipta Kerja Diserahkan DPR ke Pemerintah Besok Tanggal	13 Oktober 2020
SBY Desak Pemerintah Ungkap Aktor Dibalik Aksi Penolakan UU Ciptaker	13 Oktober 2020
Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Demo	11 Oktober 2020
Kepala Daerah Minta Jokowi Cabut Omnibus Law	10 Oktober 2020
Wanita Ditangkap Terkait Sebar Hoaks Omnibus Law	9 Oktober 2020
Omnibus Law Picu Pekerja Rentan PHK, Begini Kata Menaker	8 Oktober 2020
Mahasiswa UNS Gelar Demo Batalkan UU Omnibus Law	7 Oktober 2020
KSPSI DIY Tolak RUU Omnibus Law	4 September 2020
Dianggap Merugikan Buruh, FPB Sukoharjo Tolak Omnibus Law	26 Agustus 2020
BEM Kampus DIY Tolak Omnibus Law, Ini Alasannya	15 Agustus 2020
Ratusan Orang Turun ke Jalan Kolombo, Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja	6 Oktober 2020
Tolak Omnibuslaw, Aliansi Rakyat Unjukrasa di Simpang Gejayan hingga UIN	14 Agustus 2020
105 Mahasiswa Ditangkap Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law	8 Oktober 2020
Demo Menolak Omnibus Law dan Mengecam Perancis di Jakarta	1 November 2020

Walikota Malang Menilai Omnibus Law Bisa Memicu Konflik Daerah dan Pusat	8 Oktober 2020
Buruh Kembali Berunjuk Rasa Tolak Omnibus Law	27 Oktober 2020
Demo Tolak Omnibus Law di Depan Gedung DPR RI	7 Oktober 2020
BPIP: Omnibus Law UU Cipta Kerja Sejalan dengan Pancasila	28 November 2020
Di Forum Ekonomi Dunia, Jokowi Banggakan Omnibus Law	25 November 2020
DPR Sebut Perbaikan <i>Typo</i> UU Ciptaker Diperbolehkan	16 November 2020
Mendagri: Omnibus Law Pangkas Birokrasi Bertele-tele	12 November 2020
Sekitar 1000-an buruh akan unjuk rasa di DPR Siang ini	9 November 2020

Berita Kompas yang dianalisis dalam berita ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Berita Kompas

Judul Berita	Terbit Tanggal
Aksi Penolakan “Omnibus Law” Kembali Menggelora	17 November 2020
Bentrok Pemuda Pecah di Bau-bau, Satu orang Kritis	19 Oktober 2020
Demo Menolak “Omnibus Law” dan Mengecam Perancis di Jakarta	2 November 2020

Demo Buruh Gaungkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur	27 Oktober 2020
Demonstrasi Penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Berlanjut di Surabaya	20 Oktober 2020
Kluster Demonstrasi Mulai Muncul, Pemkab Tangerang bersiap hadapi Lonjakan Kasus Baru	22 Oktober 2020
Makna UU Omnibus Law Cipta Kerja Bagi Perbankan	23 Oktober 2020
Polisi Sipa Jaga Ketertiban Selama Libu Panjang Sekaligus Demo Omnibus Law	23 Oktober 2020
RUU Cipta Kerja, Undang-undang Sekarang dan Masa Datang	23 Oktober 2020
Surabaya Ubah Jam Belajar Daring Cegah Pelajar Ikut Berdemonstrasi	19 Oktober 2020
Unjuk Rasa di Yogyakarta, Sultan HbX Minta Demonstan Tak Anarkistis	20 Oktober 2020
Tagih Janji DPRD Banyuwangi, Unjuk Rasa Lanjutan Berujung Ricuh	22 Oktober 2020
Presiden Jokowi Janjikan Kepastian Hukum Kepada Investor	25 November 2020

Dari data analisis diatas peneliti hanya memilih berita yang sifatnya memiliki korelasi secara signifikan dari judul yang peneliti bahas sehingga pemberitaan media *Kedaulatan*

Rakyat dan *Kompas* tentang Omnibus Law pada bulan September – Oktober 2020 peneliti pilah dan pilih.

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan berita. Berita Omnibus Law Kompas diperoleh dari mengumpulkan berita dari situs kompas.id yang dilanggan oleh Prodi Komunikasi UII. Dengan menggunakan keyword Omnibus Law. Sementara itu berita Omnibus Law di Kedaulatan rakyat dikumpulkan dengan cara mengunduh dari website Kedaulatan Rakyat www.kr.co.id.

7. Konseptualisasi dan Operasionalisasi

Beberapa tema yang dikoding dalam penelitian ini dioperasionisasikan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Berikut beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

- Topik: Yang dimaksud dengan topik adalah topik yang dibicarakan dalam berita. Berdasarkan pembacaan berita yang dilakukan topik dibagi menjadi beberapa topik.

Dampak Omnibus Law	Jika topik utama berita adalah dampak dari omnibus law baik positif atau negatif.
Demo Omnibus Law	Jika topik utama berita adalah mengenai proses demonstrasi terhadap omnibus law.
Politik Omnibus Law	Jika topik utama berita adalah mengenai dinamika politik terhadap omnibus law.
Hoax Omnibus Law	Jika topik utama berita adalah mengenai hoax mengenai omnibus law.
Penolakan Omnibus Law	Jika topik utama berita adalah mengenai penolakan terhadap omnibus law.

- Narasumber: Yang dimaksud dengan narasumber adalah narasumber yang dikutip dalam berita. Narasumber pada penelitian ini adalah narasumber non-pemerintah, seperti Buruh, NGO, Swasta, Mahasiswa, dan lainnya.
- Narasumber pemerintah: Yang dimaksud dengan narasumber pemerintah adalah narasumber dari pihak pemerintah yang dikutip dalam berita. Narasumber pemerintah pada penelitian ini adalah presiden, menteri, DPR, DPRD, kepolisian, TNI, dan lainnya.
- Citra Omnibus Law: Yang dimaksud dengan citra Omnibus Law adalah bagaimana Omnibus Law dicitrakan oleh pembuat berita. Citra Omnibus Law terdiri dari citra negative atau citra positif.
- Citra Pemerintah: Yang dimaksud dengan citra pemerintah adalah bagaimana pemerintah dicitrakan dalam berita dalam kaitannya dengan Omnibus Law. Citra pemerintah terdiri dari citra negatif atau citra positif.
- Bentuk data: Yang dimaksud dengan bentuk data pada penelitian ini adalah bentuk data yang disajikan dalam berita. Bentuk data terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif.

8. Metode Analisis Data

Tujuan dari analisis isi harus didefinisikan dengan jelas sebagai tahap pertama dalam membangun desain penelitian. Desain penelitian hanya dapat dinyatakan dengan jelas jika tujuannya jelas. Mengapa? Karena desain penelitian terutama dibuat untuk menjawab pertanyaan tujuan penelitian. Sebelumnya, saya menggunakan contoh membangun rumah. Seorang arsitek tidak akan diizinkan untuk mulai bekerja tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik properti. Pemilik akan memutuskan gaya rumah yang ingin dibangunnya.

Peneliti harus mengevaluasi apakah tujuan analisis isi hanya untuk melaporkan kualitas pesan atau untuk menarik kesimpulan tentang alasan pesan tertentu berdasarkan tujuan analisis isi.

Kedua tujuan penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian yang dikembangkan. Jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan isi secara detail, ia akan berkonsentrasi pada variabel-variabel yang ada di dalamnya. Sementara itu, jika peneliti ingin mengetahui apa yang menyebabkan suatu konten, ia harus mempertimbangkan aspek lain (mungkin tidak terkait dengan analisis konten) yang berdampak pada konten tersebut. Analisis isi ini akan diuraikan satu per satu di bawah ini. Pertama, mendeskripsikan fitur pesan (describing features of the message). Banyak orang menggunakan analisis konten untuk menggambarkan fitur komunikasi.

Analisis isi digunakan dalam diskusi Holsti (1969:28) untuk menjawab pertanyaan "apa, kepada siapa, dan bagaimana" dari suatu proses komunikasi. Pertanyaan "apa" mengacu pada penerapan analisis isi untuk menjawab pertanyaan tentang substansi pesan, tren, dan perbedaan antara pesan dari komunikator yang berbeda. Penyelidikan "kepada siapa" digunakan untuk menilai asumsi konten untuk pesan yang ditujukan kepada berbagai khalayak. Sementara pertanyaan "bagaimana" sebagian besar berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk dan teknik pesan, pertanyaan "apa" terutama berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menjelaskan bentuk dan teknik pesan (misalnya, persuasi).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan dokumen untuk membantu pemahamannya tentang temuan yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki. Analisis Statis Deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Metode ini digunakan untuk melihat variabel-variabel

dalam penelitian, khususnya variabel tunggal: pemberitaan media tentang Kedaulatan Rakyat atas Omnibus Law. Frekuensi dokumen dibagi dengan jumlah dokumen dalam Analisis Statis Deskriptif.

BAB II

PROFIL KORAN KEDAULATAN RAKYAT DAN KOMPAS

A. Profil Kedaulatan Rakyat

1. Logo



Gambar 2.1 Logo Kedaulatan Rakyat

2. Sejarah Singkat

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar harian tertua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat kabar harian yang dipimpin oleh H. Soemadi M. Winohito ini memiliki semboyan bahasa Jawa, Migunanging Tumraping Liyan, dan semboyan bahasa Inggris Suara Hati Nurani Rakyat. Makna dari slogan tersebut adalah berbuat baik untuk orang lain, sekecil apa pun, dapat membuat perbedaan besar dalam hidup mereka, dan menjadi berguna bagi orang lain membuat hidup lebih bermakna.

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat terbit setiap hari dan dimulai dengan 16 halaman, namun kemudian berkembang menjadi 24 halaman dengan oplah lebih dari 125.000 eksemplar (Data Perusahaan). Kedaulatan Rakyat muncul setelah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendeklarasikan daerahnya

sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 5 September 1945, lahirlah Kedaulatan Rakyat.

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat didirikan pada hari Kamis, 27 September 1945, tidak lama setelah Republik Indonesia merdeka pada bulan Agustus (Data Perusahaan). Soedarisman Poerwokoesoemo mengadopsi istilah Kedaulatan Rakyat. Surat Kabar Harian yang beralamat di Jl. Mangukbumi, awalnya berbentuk koperasi, kemudian berubah menjadi NV pada tahun 1950, dan kemudian menjadi PT Badan Penerbitan Kedaulatan Rakyat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 7 Desember 1950. Pada tanggal 4 Desember 1990, Kedaulatan Rakyat diberikan izin, SIUPP no 127/SK/MEMPEN/A.7/1986. (Data Perusahaan).

Rakyat merupakan kejutan bagi penduduk kota Yogyakarta dan sekitarnya. Koran Kedaulatan Rakyat ingin menyebarkan informasi kepada khalayak dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian seluruh jurnalis Kedaulatan Rakyat siap untuk mencari setiap informasi dan mengolahnya secara berimbang dan objektif sehingga dapat diterima oleh pembacanya. Di era sekarang ini, sangat mudah mendapatkan informasi yang aktual, melihat teknologi dan begitu banyak media massa yang menawarkan informasi. Karena itu Koran Kedaulatan Rakyat berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pembacanya. Selain Surat Kabar Harian, Kedaulatan Rakyat juga telah menerbitkan beberapa media cetak, media penyiaran dan media online lainnya yakni Minggu Pagi, Koran Merapi, KR radio pada gelombang 102.7 FM dan krjogja.com (Data Perusahaan).

3. Koran Kedaulatan Rakyat dan Unsur Kedaerahan

Koran Kedaulatan Rakyat selalu setia dalam setiap pemberitaannya. Setia yang dimaksud adalah terhadap unsur-unsur kedaerahan. Karena Koran ini lahir dan tumbuh di Yogyakarta, maka Koran ini juga identik dengan Yogyakarta yang penuh dengan kekayaan. Dilihat dari salah satu rubrik yang disajikan bertemakan Jawa yaitu rubrik SST (sungguh-sungguh terjadi). Rubrik ini biasanya berisi tentang permasalahan sosial, politik, olahraga, atau apapun yang terpenting hal tersebut merupakan hal yang sesungguhnya terjadi. Berita yang disajikan pun merupakan hasil kiriman dari pembaca Kedaulatan Rakyat. Unsur kedaerahannya dapat dilihat dari penggunaan bahasa Jawa yang sering menghiasi tulisan yang ada dalam berita tersebut.

4. Proses Kedaulatan Rakyat Ke Pembaca

Setiap hari, rapat pagi untuk menetapkan program berita mengawali proses pengolahan berita hingga surat kabar harian siap untuk diberikan kepada konsumen atau pembaca. Lalu ada hunting (news gathering) dari konferensi pers, undangan, press release, kolaborasi, internet, TV atau radio, dan kesaksian saksi. Setelah semua data terkumpul, data tersebut digunakan untuk membuat narasi, yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur koreksi. Akan dikoreksi lagi sambil mengoreksi naskah berita yang salah. Setelah tahap penulisan dan penyuntingan, teknik desain manual digunakan untuk menyusun berita dan iklan di surat kabar. Setelah itu, Anda harus melakukan beberapa tata letak, pembuatan film, dan akhirnya pelapisan.

Setiap outlet media massa memiliki strategi tersendiri untuk mempertahankan pelanggan, dan harian Kedaulatan Rakyat telah menemukan cara untuk bersaing dengan media cetak dan penyiaran dengan memberikan informasi yang akurat, menjaga kontrol sosial, dan tidak memberikan penilaian negatif terhadap berita tersebut. Koran Harian Kedaulatan Rakyat rubrik Kaca memuat berita-berita sosial, politik, budaya, dan olahraga untuk anak muda. Selain itu, harian Kedaulatan Rakyat menerbitkan rubrik pendidikan bagi remaja yang gemar menulis dan mengarang. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendanai inisiatif pendidikan untuk anak-anak dan remaja.

B. Profil Kompas

1. Logo



Gambar 2.2 Logo Kompas

2. Sejarah

Konsep penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani yang menyuarakan keinginannya untuk menghasilkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen kepada Frans Xaverius Seda (Menteri Perkebunan di pemerintahan Soekarno). Frans kemudian mengungkapkan keinginannya kepada dua orang sahabat terdekatnya, Peter Kansius Ojong (Hanzi: Auwjong Peng Koen) (1920-1980), pemimpin redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, jurnalis mingguan Katolik Penabur. , yang sudah mengelola

majalah Intisari ketika PT Kinta hampir bangkrut pada tahun 1963. Ojong langsung menerima dan menunjuk Jakob Oetama sebagai pemimpin redaksi pertamanya.

Presiden Soekarno meminta Partai Katolik untuk mengembangkan media cetak berupa surat kabar pada tahun 1964, dan beberapa wartawan Katolik direkrut dari wartawan bulanan Intisari. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik tersebut bertemu dengan perwakilan dari Partai Katolik, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik, dan Wanita Katolik dari Majelis Tertinggi Wali Gereja Indonesia (MAWI). Mereka mencapai kesepakatan untuk membentuk "Yayasan People's Herald."

Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik) menjadi ketua awal yayasan, diikuti oleh Frans Seda sebagai wakil ketua, Franciscus Conradus Palaoensoeka sebagai penulis pertama, Jakob Oetama sebagai penulis kedua, dan P.K. Ojong sebagai bendahara. Harian ini telah diterbitkan sejak awal. Edisi pertama harian ini memuat terjemahan Marilyn Monroe, perjalanan Nugroho Notosusanto, sejarawan dari Universitas Indonesia, ke London, Inggris, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film ternama, saat membuat gambar pertamanya.

Jenderal Ahmad Yani merekomendasikan Frans Seda di awal publikasi agar Kompas menghasilkan wacana yang sesuai dengan retorika Partai Komunis Indonesia saat itu. Namun, Jacob Oetama dan sejumlah tokoh agama Katolik, seperti Monsignor Albertus Soegijapranata dan I.J. Kasimo, tidak mau menerima begitu saja karena iklim politik, ekonomi, dan infrastruktur pada masa itu tidak mendukung.

Partai Katolik, di sisi lain, bersikeras menerbitkan surat kabar. Pembangunan perusahaan dialokasikan untuk P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Mereka mulai mempersiapkan penerbitan surat kabar baru, corong Partai Katolik. Namun, iklim politik yang kacau pada masa itu membuat tugas mereka menjadi sulit. Tujuannya agar publikasi

ini dikenal sebagai "Bentara Rakyat". PKI, menurut Frans Seda, sadar skema itu sedang digagalkan. Sebaliknya, Bung Karno setuju untuk melanjutkan sampai izin diberikan. Frans Seda menyinggung PKI, yang merupakan salah satu partai politik besar Indonesia pada 1950-an dan 1960-an, dan yang menempati urutan keempat dalam pemilihan umum 1955.

Meskipun izin telah diperoleh, tidak ada "Bentara Rakyat" yang dikeluarkan. Ternyata, tidak semua batu sandungan bisa diatasi. Masih ada satu rintangan lagi yang harus dilalui: persetujuan Pangdam Jakarta yang waktu itu dipegang oleh Letkol Dachja. Jika syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi, izin operasi keluar diperoleh dari markas besar militer di Jakarta. Akhirnya, karena mayoritas penduduk Flores beragama Katolik, para jurnalis pergi ke pulau Flores untuk mengumpulkan tanda tangan.

Nama Bentara dipilih untuk mencerminkan preferensi masyarakat Flores. Ia mengaku majalah Herald juga cukup populer di sana. Frans Seda melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang persiapan penerbitan pertama surat kabar itu ketika akan terbit pertama kali. Namun, Presiden Soekarno-lah yang menciptakan istilah "Kompas", yang berarti "arah". Akhirnya, berdasarkan kesepakatan redaksi saat itu, usulan Presiden Soekarno untuk mengganti nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas diterima. Nama itu diubah menjadi Kompas atas permintaan Presiden Soekarno. "Kompas" mengandung arti "memberikan petunjuk dan jalan dalam melintasi lautan dan hutan", demikian menurut Bung Karno. Kompas akhirnya terbit pertama kali pada 28 Juni 1965, setelah mengumpulkan bukti dari 3000 calon pembeli sebagai kriteria untuk mendapatkan izin penerbitan. Kantor redaksi Kompas awalnya bertempat di rumah Jakob Oetama, namun kemudian dipindahkan ke kantor redaksi Majalah Intisari. Edisi awal Kompas hanya memuat empat (4) halaman dan enam (6) iklan. Selanjutnya, Koran Kompas pertama kali diterbitkan sebagai surat kabar

mingguan 8 halaman pada tahun 1965, kemudian empat kali seminggu, dan akhirnya, hanya dalam dua tahun, telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah 30.650 eksemplar.

P.N. Eka Graphic yang dimiliki oleh harian Abadi dan terkait dengan Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) memproduksi Kompas versi pertama. Kompas awalnya terbit pada 28 Juni 1965, dengan semboyan " Amanat Hati Nurani Rakyat". Judul halaman atas berbunyi, "Konferensi Asia-Afrika II Ditunda Empat Bulan." Sementara itu, dia mulai memperkenalkan dirinya di sudut kanan bawah dengan tulisan "Ayo mengikat simpul." Dimulai dengan Mang Nasy hari ini."

Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J.Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem tercantum di pojok kiri atas halaman pertama. Menurut Jakob Oetama, nama P. K. Ojong merupakan tabu politik saat itu. Bagaimanapun, Soekarno memandang rendah penampilan Ojong.

Keuntungan tidak dapat diperoleh dalam situasi politik saat itu, dan tidak menyenangkan tidak dapat dihindari. Ketika sekelompok pasukan bersenjata menahan enam jenderal yang dituduh menjadi anggota Dewan Jenderal pada pagi hari 30 September 1965, ketika Kompas berusia tiga bulan, sebagian besar Jakarta tertidur lelap. Peristiwa ini mengubah lintasan republik. Hal ini tercatat dalam sejarah sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Mereka, seperti beberapa surat kabar lain yang dibuat bekerja sama dengan Kompas, terkait erat dengan upaya untuk memberikan kontra-narasi kepada pers yang terkait dengan ideologi komunis, seperti PKI, dan publikasi lain yang dituduh tidak revolusioner.

Percetakan memberi tahu Agus Parengkuan dan Ponis Purba, yang bekerja pada shift malam, bahwa Kompas dan publikasi lainnya tidak dapat diterbitkan sehari setelah tragedi itu. Berita hanya dapat disiarkan oleh Harian TNI, Berita Yudha, Kantor Berita Antara, dan Kantor Berita TNI. Militer Jakarta memberlakukan larangan pencetakan. "Penting untuk mengadopsi langkah-langkah pengendalian terhadap media berita untuk mengamankan pelaporan pengkhianatan yang membingungkan oleh apa yang disebut Komando Gerakan 30 September atau Dewan Revolusi," perintah itu menambahkan.

Agus Parengkuan dan Ponis Purba masih berpendapat Kompas tidak boleh dilarang terbit saat ini. Pasalnya, Kompas mengecam pemberontakan tersebut, dan Kompas edisi 2 Oktober juga akan memuat pernyataan Laksamana RE Martadinata, Kepala Staf Angkatan Laut.

Kompas tidak terselamatkan oleh serangan terhadap PKI. Baru pada tanggal 6 Oktober 1965, surat kabar tersebut diberi wewenang untuk menerbitkan kembali. Durasi periode tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Ada beberapa asumsi, pertanyaan, dan analisis yang beredar. Mengapa semua surat kabar dilarang, hanya menyisakan publikasi militer? Perusahaan Kompas berkembang. Kompas memiliki sirkulasi sekitar 4.800 eksemplar ketika pertama kali dicetak. Pendistribusiannya meningkat menjadi 8.003 eksemplar begitu beralih ke percetakan unggulan, Percetakan Periode Merdeka, hingga era Soeharto dilarang.

Kompas memiliki oplah 23.268 eksemplar ketika diterbitkan kembali pada 6 Oktober 1965. Zaman telah berubah. Jenderal Suharto mengambil alih sebagai pengganti Sukarno. Sirkulasi Kompas mencapai puncaknya pada hampir 600.000 eksemplar per hari pada tahun 1999, setahun setelah Suharto dipaksa mundur. Pasar terbesar menurut riset yang dilakukan

lembaga riset AC Nielsen pada 1999 masih di sekitar Jakarta 46,77 persen, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02 persen, Jawa Barat 13,02 persen, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67 persen, Jawa Timur 2,04 persen, Sumatera 8,81 persen, Kalimantan 2,16 persen, dan Indonesia Timur 4,23 persen. Pada 1980, Gramedia, induk usaha Kompas, tercatat sebagai perusahaan yang membayar pajak tertinggi nomor 32, sedangkan pada 1993, PT Kompas Media Nusantara diprediksi menghasilkan Rp 240 miliar per tahun dengan laba bersih Rp 30 hingga 35 triliun. . Dengan penerbitan bukunya pada tahun 1991, PT Gramedia menduduki peringkat ke-151.

Dengan perkembangannya, harian Kompas, seperti kebanyakan surat kabar lainnya, kini terbagi menjadi tiga bagian: bagian depan, yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga, dan bagian iklan baris yang dikenal sebagai "Klasika. " PT Kompas Media Nusantara adalah penerbit Harian Kompas

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Data

Adapun analisis isi pada penelitian ini ditinjau dari Topik, Narasumber, Narasumber Pemerintah, Citra Omnibus Law, Citra Pemerintah, dan Bentuk Data

1. Berita tentang Omnibus Law dari *Kedaulatan Rakyat*

a. Topik

Topik	Frekuensi	%
Dampak Omnibus Law	2	13,3%
Demo Omnibus Law	5	33,3%
Penolakan Omnibus Law	6	40%
Hoaks Omnibus Law	1	6,6%
Politik Omnibus Law	1	6,6%
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan topik dari isi berita Omnibus Law pada *Kedaulatan Rakyat* dapat diketahui bahwa berita tentang penolakan Omnibus Law adalah yang paling banyak diberitakan sebanyak 40%, kemudian diikuti oleh pemberitaan tentang Demo Omnibus Law sebanyak 33,3%; Dampak Omnibus Law sebanyak 13,3%; dan masing-masing Hoaks Omnibus Law dan Politik Omnibus Law sebanyak 6,6%.

Salah satu contoh topik berita penolakan adalah dengan judul “Demo Tolak Omnibus Law di Depan Gedung DPR RI”. Banyaknya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, salah satunya dapat disebabkan oleh karena RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan. Selain itu, penyusunan RUU dinilai

cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

b. Narasumber di Luar Pemerintah

Narasumber	Frekuensi	%
Mahasiswa	3	27,3%
Buruh	1	9,09%
NGO	5	45,5%
Swasta	1	9,09%
Tokoh Politik	1	9,09%
Masyarakat Umum	0	0
Lainnya	0	0
Total	11	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data narasumber di luar pemerintah yang dikutip oleh *Kedaulatan Rakyat*, narasumber dari NGO adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 45,5%; kemudian diikuti oleh mahasiswa 27,3%, Buruh, Swasta, dan Tokoh Politik masing-masing sebanyak 9,09%.

Salah berita yang narasumbernya paling banyak yang melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law adalah “Buruh Kembali Berunjuk Rasa Tolak Omnibus Law”. Narasumber dalam berita ini adalah buruh dan NGO.

c. Narasumber Pemerintah

Narasumber	Frekuensi	%
DPR/DPRD	1	20%
Presiden	0	0
Menteri	2	40%
Polri	1	20%
TNI	0	0
Lainnya	1	20%
Total	5	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data narasumber pemerintah yang dikutip oleh *Kedaulatan Rakyat*, narasumber dari pihak menteri adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 40%; kemudian diikuti oleh narasumber DPR/DPRD, Polri, dan Lainnya masing-masing 20%.

Contoh berita yang memuat narasumber pemerintah adalah “Walikota Malang Menilai Omnibus Law Bisa Memicu Konflik Daerah dan Pusat”. Narasumber pemerintah pada penelitian ini adalah DPR dan Walikota.

d. Citra Omnibus Law

Citra Omnibus Law	Frekuensi	%
Positif	4	26,6%
Negatif	11	73,33%
Netral	0	0%
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data citra Omnibus Law pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, Omnibus Law lebih banyak dicitrakan negatif, yaitu sebanyak 73,33% dan dicitrakan positif sebanyak 26,6%.

Contoh berita yang membuat citra RUU Omnibus Law negative adalah “105 Mahasiswa Ditangkap Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law.” Pada berita tersebut, citra Omnibus Law dicitrakan negative karena mahasiswa ditangkap karena menolak RUU Omnibus Law.

e. Citra Pemerintah

Citra Pemerintah	Frekuensi	%
Positif	0	0%
Negatif	6	40%
Netral	9	60%
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data citra Pemerintah pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, Pemerintah lebih banyak dicitrakan netral, yaitu sebanyak 60%; pemerintah dicitrakan negatif sebanyak 40%. Pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, pemerintah tidak ada dicitrakan positif.

Contoh berita yang menunjukkan pemerintah dicitrakan negative adalah “Ratusan Orang Turun ke Jalan Kolombo, Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja.” Pada berita tersebut, pemerintah dinilai tidak pro terhadap rakyat karena ingin mengesahkan RUU Omnibus Law.

d. Bentuk Data

Bentuk Data	Frekuensi	%
Kualitatif	15	100%
Kuantitatif	0	0
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data bentuk data pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, 100% data dalam pemberitaan *Kedaulatan Rakyat* adalah berbentuk kualitatif. Adapun contoh data kualitatif pada salah satu berita adalah “KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Gabungan elemen masyarakat dari buruh dan ormas kepemudaan Kabupaten Karanganyar menggelar aksi damai menolak tindakan anarkistis dalam penyampaian aspirasi di Mapolres Karanganyar, Senin (19/10). Penyampiannya secara dialogis dinilai lebih mengena dan minim gesekan yang mengarah pada perusakan aset.” Pada kutipan tersebut, KRJogja tidak menyebut angka atau statistic yang menunjukkan bahwa KRJogja tidak menampilkan data kuantitatif, tetapi menyajikan narasi yang menunjukkan data kualitatif.

2. Analisis Isi berita Omnibus Law pada Kompas

a. Topik

Topik	Frekuensi	%
Dampak Omnibus Law	6	40%
Demo Omnibus Law	3	20%
Penolakan Omnibus Law	5	35,3%
Hoaks Omnibus Law	0	0%
Politik Omnibus Law	1	6,6%
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan topik dari isi berita Omnibus Law pada *Kompas* dapat diketahui bahwa berita tentang Dampak Omnibus Law adalah yang paling banyak diberitakan sebanyak 40%, kemudian diikuti oleh pemberitaan tentang Penolakan Omnibus Law sebanyak 35,3%; Demo Omnibus Law sebanyak 20%; dan Politik Omnibus Law sebanyak 6,6%.

Contoh berita yang memuat dampak Omnibus Law adalah “Surabaya Ubah Jam Belajar Daring Cegah Pelajar Ikut Berdemonstrasi.”

b. Narasumber di Luar Pemerintah

Narasumber	Frekuensi	%
Mahasiswa	2	28,6%
Buruh	2	28,6%
NGO	4	57,14%
Swasta	0	0
Tokoh Politik	1	14,28%
Masyarakat Umum	0	0
Lainnya	0	0
Total	7	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data narasumber di luar pemerintah yang dikutip oleh *Kompas*, narasumber dari NGO adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 57,14%; kemudian diikuti oleh mahasiswa dan buruh masing-masing 28,6%, dan dari Tokoh Politik sebanyak 14,28%.

Contoh berita yang memuat narasumber NGO adalah “Aksi Penolakan “Omnibus Law” Kembali Menggelora”.

c. Narasumber Pemerintah

Narasumber	Frekuensi	%
DPR/DPRD	1	14,28%
Presiden	0	0
Menteri	0	0
Polri	3	42,85%
TNI	0	0
Lainnya	3	42,85%
Total	7	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data narasumber pemerintah yang dikutip oleh *Kompas*, narasumber dari pihak Polri dan pihak lainnya adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 42,85%; kemudian diikuti oleh narasumber DPR/DPRD sebanyak 14,28%.

Contoh berita yang memuat narasumber pemerintah dalam hal ini pihak Poliri adalah “Demo Menolak “Omnibus Law” dan Mengecam Perancis di Jakarta.”

d. Citra Omnibus Law

Citra Omnibus Law	Frekuensi	%
Positif	2	13,3%
Negatif	13	86,7%
Netral	0	0
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data citra Omnibus Law pada pemberitaan *Kompas*, Omnibus Law lebih banyak dicitrakan negatif, yaitu sebanyak 86,7% dan dicitrakan positif sebanyak 13,3%.

Contoh berita yang memuat citra Omnibus Law yang negatif adalah “Bentrok Pemuda Pecah di Bau-bau, Satu orang Kritis”.

e. Citra Pemerintah

Citra Pemerintah	Frekuensi	%
Positif	1	6,6%
Negatif	3	20%
Netral	11	73,3%
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data citra Pemerintah pada pemberitaan *Kompas*, Pemerintah lebih banyak dicitrakan netral, yaitu sebanyak 73,3%; pemerintah dicitrakan negatif sebanyak 20%, dan pemerintah dicitrakan positif 6,6%.

Contoh berita yang memuat citra pemerinta yang netral adalah “Demo Buruh Gaungkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.”

f. Bentuk Data

Bentuk Data	Frekuensi	%
Kualitatif	15	100%
Kuantitatif	0	0
Total	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan data bentuk data pada pemberitaan *Kompas*, 100% data dalam pemberitaan *Kompas* adalah berbentuk kualitatif. Salah satu contoh berita yang menunjukkan data kualitatif adalah “ Aksi oleh Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim itu merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa yang akan dilaksanakan sampai dengan Jumat (23/10/2020). Demonstrasi pada Selasa itu berlangsung di depan Gedung NegaraGrahadi.”

B. Pembahasan

1. Perbandingan Berita Omnibus Law di Kedaulatan Rakyat dan Kompas

Perbandingan analisis isi berita Omnibus Law pada *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas*

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Topik

Topik	Kedaulatan Rakyat	Kompas
Dampak Omnibus Law	13,3%	40%
Demo Omnibus Law	33,3%	20%
Penolakan Omnibus Law	40%	35,3%
Hoaks Omnibus Law	6,6%	0%
Politik Omnibus Law	6,6%	6,6%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* memberitakan Dampak Omnibus Law sebanyak 13,3%, sedangkan *Kompas* sebanyak 40%. Pada topik Demo Omnibus Law, *Kedaulatan Rakyat* memberitakannya sebanyak 33,3% dan *Kompas* sebanyak 20%. Pada topik Penolakan Omnibus Law, *Kedaulatan Rakyat* memberitakannya sebanyak 40% dan *Kompas* sebanyak 35,3%.

Pada topik Hoaks Omnibus Law, *Kedaulatan Rakyat* memberitakannya sebanyak 6,6% dan *Kompas* tidak memberitakannya. Pada topik Politik Omnibus Law, *Kedaulatan Rakyat* memberitakannya sebanyak 6,6% dan *Kompas* sebanyak 6,6%.

b. Narasumber di Luar Pemerintah

Narasumber	Kedaulatan Rakyat	Kompas
Mahasiswa	27,3%	28,6%
Buruh	9,09%	28,6%
NGO	45,5%	57,14%
Swasta	9,09%	0
Tokoh Politik	9,09%	14,28%
Masyarakat Umum	0	0
Lainnya	0	0

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* mengutip mahasiswa sebanyak 27,3%, sedangkan *Kompas* sebanyak 28,6%. *Kedaulatan Rakyat* mengutip buruh sebanyak 9,09%, sedangkan *Kompas* sebanyak 28,6%.

Kedaulatan Rakyat mengutip NGO sebanyak 45,5%, sedangkan *Kompas* sebanyak 57,14%. *Kedaulatan Rakyat* mengutip narasumber swasta sebanyak 9,09%, sedangkan *Kompas* tidak mengutip. *Kedaulatan Rakyat* mengutip Tokoh Politik sebanyak 9,09%, sedangkan *Kompas* sebanyak 14,28%. Baik *Kedaulatan Rakyat* maupun *Kompas* tidak mengutip narasumber masyarakat umum.

c. Narasumber Pemerintah

Narasumber	Kedaulatan Rakyat	Kompas
DPR/DPRD	20%	14,28%
Presiden	0	0
Menteri	40%	0
Polri	20%	42,85%
TNI	0	0
Lainnya	20%	42,85%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* mengutip DPR/DPRD sebanyak 20%, sedangkan *Kompas* sebanyak 14,28%. *Kedaulatan Rakyat* mengutip menteri sebanyak 40%, sedangkan *Kompas* tidak mengutip. *Kedaulatan Rakyat* mengutip narasumber dari Polri sebanyak 20%, sedangkan *Kompas* sebanyak 42,85%. Pada pemberitaannya *Kedaulatan Rakyat* mengutip narasumber lainnya sebanyak 20%, sedangkan *Kompas* sebanyak 42,85%.

d. Citra Omnibus Law

Citra Omnibus Law	Kedaulatan Rakyat	Kompas
Positif	26,6%	13,3%
Negatif	73,33%	86,7%
Netral	0%	0%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya Omnibus Law dicitrakan positif sebanyak 26,6%, sedangkan *Kompas* sebanyak 13,3%.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya Omnibus Law dicitrakan negatif sebanyak 73,33%, sedangkan *Kompas* sebanyak 86,7%. Baik pada *Kedaulatan Rakyat* maupun *Kompas*, dalam pemberitaannya Omnibus Law tidak ada yang dicitrakan netral.

e. Bentuk Data

Bentuk Data	Frekuensi	%
Kualitatif	100%	100%
Kuantitatif	0	0

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas* dalam pemberitaannya tentang Omnibus Law sama-sama menyajikan data kualitatif sebanyak 100%. Tidak ada data dalam bentuk kuantitatif.

Topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakyat* adalah tentang penolakan terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah menteri. Pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan netral. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif.

Topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kompas* adalah tentang Dampak terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah Polri dan unsur pemerintah lainnya. Pada pemberitaan *Kompas*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan negatif. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif.

f. Citra Pemerintah

Citra Pemerintah	Kedaulatan Rakyat	Kompas
Positif	0%	6,6%
Negatif	40%	20%
Netral	60%	73,3%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya, pemerintah dicitrakan positif sebanyak 0%, sedangkan *Kompas* sebanyak 6,6%. *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya, pemerintah dicitrakan negatif sebanyak 40%, sedangkan *Kompas* sebanyak 20%. *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya, pemerintah dicitrakan netral sebanyak 60%, sedangkan *Kompas* sebanyak 73,3%.

2. Citra Pemerintah di Pemberitaan Omnibus Law

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa citra pemerintah di pemberitaan Omnibus Law adalah negatif. Citra pemerintah yang negatif disebabkan karena pemerintah dinilai tidak prorakyat. UU Omnibus Law dinilai merugikan masyarakat. Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap.

Noelle-Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Media massa memiliki tiga sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik yaitu : ubikuitas, kumulatif, dan konsonan.

Sifat ubikuitas (*ubiquity*) mengacu pada fakta bahwa media merupakan sumber informasi yang sangat luas karena terdapat dimana saja, dengan kata lain ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat dimana saja, dengan kata lain ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat di mana-mana. Karena media terdapat di mana saja maka media menjadi instrumen yang sangat penting , diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha mendapat dukungan dari publik terhadap pandangan atau pendapat yang disampaikannya, dan selama terhadap pandangan atau pendapat yang disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu terdapat di mana-mana. Sifat konsonan (*consonant*) mengacu pada kesamaan kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut media massa.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Kedaulatan Rakyat sebagai media lokal lebih banyak memuat berita pemerintah pada pemberitaan Omnibus Law dengan citra negative daripada *Kompas* sebagai media nasional.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat (2016) yang mengatakan bahwa melemahnya kredibilitas media massa nasional disebabkan oleh sistem komunikasi politik dan kebijakan politik media massa yang berlaku. Selain itu, ketidakberdayaan para pengelola media massa menghadapi tekanan politik eksternal dalam mendefinisikan dan menggambarkan realitas sosial. Tekanan eksternal ini akan mempengaruhi objektivitas media dalam mengkritisi pemerintah.

Lain halnya dengan media massa lokal yang tidak memiliki beban dan minim tekanan dari pemerintah di tingkat pusat, sehingga media massa lokal bisa lebih kritis terhadap pemerintah.

Table secara umum hasil analisis isi berita Omnibus Law pada *Kedaulatan Rakyat* dan Kompas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Analisis berita omnibus law	<i>Kedaulatan Rakyat</i>	Kompas	Hasil penelitian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	Hasil penelitian Kompas
1	Topik berita omnibus law	Dampak Omnibus Law, Demo omnibus Law, Penolakan Omnibus Law, Hoaks omnibus Law, politik, omnibus Law	Dampak Omnibus Law, Demo omnibus Law, Penolakan Omnibus Law, Hoaks omnibus Law, politik, omnibus Law	<i>Kedaulatan Rakyat</i> memberitakan Dampak Omnibus Law sebanyak 13,3%, Demo omnibus law <i>Kedaulatan Rakyat</i> memberitakannya sebanyak 33,3%, Pada topik Penolakan Omnibus Law, <i>Kedaulatan Rakyat</i> memberitakannya	<i>Kompas</i> sebanyak 40%. Pada topik Demo Omnibus Law, <i>Kompas</i> sebanyak 20%, Pada topik Penolakan Omnibus Law <i>Kompas</i> sebanyak 35,3%, Pada topik Hoaks Omnibus Law <i>Kompas</i> tidak memberitakannya,

				<p>sebanyak 40%, Pada topik Hoaks Omnibus Law, <i>Kedaulatan Rakyat</i> memberitakannya sebanyak 6,6%, Pada topik Politik Omnibus Law, <i>Kedaulatan Rakyat</i> memberitakannya sebanyak 6,6%</p>	<p>Pada topik Politik Omnibus Law, <i>Kompas</i> sebanyak 6,6%.</p>
2	<p>Narasumber di luar Pemerintah</p>	<p>Mahasiswa Buruh NGO Swasta Tokoh Politik Masyarakat Umum</p>	<p>Mahasiswa Buruh NGO Swasta Tokoh Politik Masyarakat Umum</p>	<p><i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip mahasiswa sebanyak 27,3%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip buruh sebanyak 9,09%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip NGO sebanyak 45,5%, <i>Kedaulatan</i></p>	<p>mengutip mahasiswa <i>Kompas</i> sebanyak 28,6%, mengutip buruh <i>Kompas</i> sebanyak 28,6%, NGO <i>Kompas</i> sebanyak 57,14%, swasta <i>Kompas</i> tidak mengutip, mengutip tokoh politik <i>Kompas</i> sebanyak 14,28%.</p>

				<p><i>Rakyat</i> mengutip narasumber swasta sebanyak 9,09%,.</p> <p><i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip Tokoh Politik sebanyak 9,09%, Baik <i>Kedaulatan Rakyat</i> maupun <i>Kompas</i> tidak mengutip narasumber masyarakat umum.</p>	
3	Narasumber di dalam pemerintahan	DPR/DPRD,Pr esiden Menteri, Polri, TNI, lainnya	DPR/DPRD,P residen Menteri, Polri, TNI, lainnya	<p><i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip DPR/DPRD sebanyak 20%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip menteri sebanyak 40%, <i>Kedaulatan</i></p>	<p>DPR/DPRD <i>Kompas</i> sebanyak 14,28%. menteri <i>Kompas</i> tidak mengutip, dari Polri <i>Kompas</i> sebanyak 42,85%. <i>Kompas</i> sebanyak</p>

				<p><i>Rakyat</i> mengutip narasumber dari Polri sebanyak 20%, Pada pemberitaannya <i>Kedaulatan Rakyat</i> mengutip narasumber lainnya sebanyak 20%,</p>	<p>42,85%. narasumber lainnya <i>Kompas</i> sebanyak 42,85%.</p>
4	Citra Omnibus Law	Positif, Negatif dan Netral	Positif, Negatif dan Netral	<p><i>Kedaulatan Rakyat</i> dalam pemberitaannya Omnibus Law dicitrakan positif sebanyak 26,6%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> dalam pemberitaannya Omnibus Law dicitrakan negatif sebanyak 73,33%, untuk yang netral</p>	<p>dicitrakan positif di berita <i>Kompas</i> sebanyak 13,3%, dicitrakan negatif di berita <i>Kompas</i> sebanyak 86,7%. untuk yang netral tidak ada yang dicitrakan</p>

				tidak ada yang dicitrakan	
5	Citra Pemerintah	Positif, Negatif dan Netral	Positif, Negatif dan Netral	<i>Kedaulatan Rakyat</i> dalam pemberitaannya, pemerintah dicitrakan positif sebanyak 0%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> dalam pemberitaannya, pemerintah dicitrakan negatif sebanyak 40%, <i>Kedaulatan Rakyat</i> dalam pemberitaannya pemerintah dicitrakan netral sebanyak 60%,	dicitrakan positif dari berita <i>Kompas</i> sebanyak 6,6%, pemberitaannya pemerintah dicitrakan negatif <i>Kompas</i> sebanyak 20%, pemberitaannya pemerintah dicitrakan netral <i>Kompas</i> sebanyak 73,3%.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakyat* adalah tentang penolakan terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah menteri. Pada pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan netral. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif. Topik paling banyak yang diberitakan oleh *Kompas* adalah tentang Dampak terhadap Omnibus Law. Narasumber di luar pemerintah yang paling banyak dikutip oleh adalah dari NGO. Narasumber pemerintah yang paling banyak dikutip adalah Polri dan unsur pemerintah lainnya. Pada pemberitaan *Kompas*, Omnibus Law paling banyak dicitrakan negatif. Bentuk data yang disajikan adalah kualitatif.

Pada pemberitaan tentang Omnibus Law di *Kedaulatan Rakyat*, pemerintah lebih banyak dicitrakan netral, sedangkan pada *Kompas*, pemerintah lebih banyak dicitrakan netral sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan kedua media berita tentang omnibus Law sama-sama netral dalam ranah pemberitaan.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan peneliti yang ingin meneliti mengenai kredibilitas sebuah media, dapat meneliti pemberitaan tentang sebuah isu yang sedang marak-maraknya. Penelitian tersebut sebaiknya tidak menggunakan analisis isi kuantitatif melainkan dengan menggunakan metode yang lain seperti analisis framing serta melakukan observasi dan wawancara jika menginginkan hasil yang lebih dalam lagi.

Teruntuk saran dari peneliti secara akademik, kepada bibit ataupun calon peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau metode kualitatif dan penelitian ini maka disarankan untuk dilakukan secara komprehensif dan mendetail, tentang isu berita Omnibus Law.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra Moerat Ramadhan, Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law, <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>.
- Arya Tangkas , Ahmad Muntaha , Supadiyanto, *Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja dalam Pilkada Sleman 2020*, Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 6. No. 1, Januari 2022
- Tari Suprobo, Royke Siahainenia , dan Dewi Kartika Sari, *Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Profil Dan Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti (Studi Pada Situs Berita Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com periode Oktober - Desember 2014) Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Oktober - Desember 2014)
- Firman Freaddy Busroh. 2017. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017,
- Bappenas. 2019. *Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK,
- Ika Novitas, dkk. 2021. *Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id)*.
- Adiitya Yoga Pratama, dkk. 2021. *Analisis Sentimen Media Sosial Twitter dengan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Seleksi Fitur Chi-Square (Kasus Omnibus Law Cipta Kerja)*.
- Bondan Kurniasih. 2021. *Pembangkaian ruu omnibus law cipta kerja dalam media Online (Analisis Framing Pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Katadata.co.id Periode Maret-Mei 2020)*.
- Mochamad Nuryadi. 2013. *Analisis isi informasi lingkungan hidup di beberapa surat kabar, antara lain Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan*.
- Syamsiah Amali. 2017. *Analisis Isi Program Kominfo Pada Surat Kabar Daerah*.
- Almunaware, dkk. 2015. *Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur Dki Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado*.
- Widyi Nugroho. 2021. *Analisis Framing Pemberitaan Polemik Omnibus Law Cipta Kerja Indonesia dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin di Kompas.com dan Okezone.com*.
- Morissan. 2013. *Teori komunikasi : individu hingga massa*. Jakarta : Kencana.
- Sutarso, Joko. 2012. *Menggagas Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal*.
- Griffin, Jill. 2003. *Customer Loyalty : Menumbuhkan Dan Mempertahankan. Pelanggan*. Penerbit Erlangga

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. *Teori Komunikasi, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.

Eriyanto. 2018. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Flournoy, Don Michael. 1989. *Analisa Isi Surat Kabar Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kerlinger. 1973. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.

Holsti, Ole R. 1969. *Content Analysis for the Social Science and Humanities*. Reading. Massachusetts : Addison

Hukumonline.com

Kompas.Com diakses 11 November 2020

www.kr.co.id.